

BAILEO:

JURNAL SOSIAL HUMANIORA

Volume: I
Nomor : I, September 2023

FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA
e-ISSN 3026-3468
p-ISSN 3026-2593
Naskah diterima:
28/08/2023;
direvisi akhir:
25/09/2023;
disetujui:
26/09/2023;

MENGGALI POTENSI PARIWISATA: INOVASI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Rivan Jonea Mailoa^{1*}, St. K. Ohoiwutun², Ivony Y. Rahanra³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pattimura

*Email korespondensi: vianmailoa@gmail.com



This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license.

ABSTRACT

This article aims to describe efforts to increase village revenue by harnessing the tourism potential in Negeri Latuhalat, Ambon City. This research employs a qualitative research approach with in-depth interview techniques and direct observation to gather data. The research findings indicate that Negeri Latuhalat possesses natural, cultural, and historical wealth that has not been fully utilized for tourism development. Through the analysis of existing potentials, infrastructure development efforts, the design of sustainable tourism programs, and active engagement of the local community, it is anticipated that Village Original Revenue (VOR) can be significantly enhanced. This article outlines specific steps that can be taken to implement tourism innovations aimed at creating positive impacts on the village economy and local community. Consequently, this article provides crucial guidance for policymakers, business actors, and academics interested in advancing the tourism potential and village economy in Negeri Latuhalat and its surrounding region.

Keywords: *Tourism, Village Original Revenue, Negeri Latuhalat*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata pada Negeri Latuhalat, Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung dalam memperoleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negeri Latuhalat memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan menganalisis potensi-potensi yang ada, melakukan upaya pengembangan infrastruktur, merancang program pariwisata berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, diharapkan PADes dapat ditingkatkan secara signifikan. Artikel ini menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengimplementasikan inovasi pariwisata dalam rangka menghadirkan dampak positif pada ekonomi desa dan masyarakat setempat. Dengan demikian, artikel ini memberikan panduan penting bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi yang tertarik dalam memajukan potensi pariwisata dan ekonomi desa di Negeri Latuhalat dan wilayah sekitarnya.

Kata kunci: *Pariwisata, Pendapatan Asli Desa, Negeri Latuhalat*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka setelah melepaskan diri dari kungkungan Penjajahan yang begitu lama dan ternyata meninggalkan keadaan keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat. Keadaan yang disebutkan di atas terlihat dengan jelas pada masyarakat yang mendiami daerah pedesaan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu pembangunan desa merupakan keharusan yang tidak dapat diabaikan apabila Negara ingin mencapai tujuannya sebagaimana termaktub dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur (Amaliah & Sakir, 2023).

Kalau memang demikian seharusnya, maka pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Nasional Indonesia. Dengan majunya desa, berarti maju negara pula yang berarti masyarakat Indonesia menjadi maju dimana rakyatnya menjadi sejahtera (Khairinnisa & Merina, 2022). Dikatakan demikian karena sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mendiami daerah pedesaan.

Pengalaman bangsa Indonesia selama ini, pembangunan daerah pedesaan sudah dilakukan namun belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Pembangunan desa selama ini paling tidak sampai dengan akhir abad dua puluh ini, dilakukan memang secara terencana, namun bersifat Top Down atau dari atas sehingga hampir selalu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa-desa (Sakir & Mustari, 2022). Desa-desa seolah-olah hanya sebagai objek pembangunan dimana mereka dikondisikan untuk hanya serba menerima apa yang diturunkan dari pemerintah di atasnya dan ini merupakan kelemahan pembangunan yang selama ini dilakukan.

Menyadari akan kelemahan ini, maka sejak tahun 1999 dengan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berubah paradigma pembangunan Indonesia khususnya pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa yang bersifat dari atas atau top down berubah menjadi dari bawah atau bottom up. Semangat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah perencanaan partisipatif. (Kaja et al., 2021) Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan mulai dari desa dengan pelibatan secara aktif masyarakat desa tersebut (Agama & Issn, 2022).

Melalui pembangunan yang dimulai dari desa oleh masyarakat desa, maka diharapkan percepatan pembangunan dapat tercapai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud (Nur et al., 2023). Namun demikian, harus disadari bahwa, berbagai program pembangunan desa yang dapat direncanakan dan dilaksanakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila cukup tersedia sumber pembiayaan pembangunan desa (R Ait Novatiani et al., 2023).

Dalam era otonomi daerah/desa dewasa ini, pembangunan desa tidak hanya pembiayaannya tidak saja bersumber dari pemerintah di atasnya, tetapi lebih dan sangat diharapkan berasal dari sumber pendapatan asli desa itu sendiri. Mengenai sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 butir a dikatakan: pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Ismowati et al., 2022).

Sehubungan dengan sumber-sumber pendapatan asli desa sebagaimana disebutkan di atas, maka desa dituntut untuk berusaha menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa untuk diberdayakan menjadi sumber pendapatan asli desa yang diharapkan meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam pembiayaan pembangunan (Dicky Dwi Wahyudi et al., 2022). Karena itu, faktor-faktor lingkungan pemerintah desa yang ada dan mempengaruhi pemerintah desa perlu diketahui, diidentifikasi, dianalisis dan ditetapkan sebagai sumber pendapatan jika dimungkinkan melalui peraturan desa. Tegasnya bahwa, setiap organisasi memiliki lingkungan tertentu, dimana organisasi saling berinteraksi dan bergantung dengan lingkungannya itu. Hal ini jelas diakui oleh Salusu (2005 :319) yang mengatakan bahwa; "organisasi mana pun juga tidak terlepas dari hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sebagaimana umumnya diartikan meliputi; kondisi, situasi keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi (Sandag et al., 2022).

Faktor-faktor lingkungan hidup dari sebuah pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di atas, tentu sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. (Akomodasi et al., 2022) Walaupun demikian, pemerintahan desa pun harus berusaha mengendalikan faktor-faktor lingkungan hidupnya tersebut. Hal ini penting untuk disadari dan dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan akan menghambat usaha pencapaian tujuan pemerintahan desa (Mebri et al., 2022). Peluang-peluang yang ada dalam lingkungan pemerintahan desa yang notabene dapat mendorong atau membantu pemerintah desa dalam operasinya untuk mencapai tujuan, harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa (Muhammad Frengki et al., 2023). Hal ini juga sekaligus untuk menangkap peluang yang diberikan oleh perundang-undangan bagi pemerintah desa untuk menggali berbagai sumber yang berasal dari kekayaan desa sebagai sumber pendapatan desa. Dimana berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Tahun 2005, dirinci kekayaan desa yang terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

Peluang-peluang dari faktor-faktor lingkungan organisasi pemerintah desa ini, perlu dimanfaatkan dengan baik dan segera ditetapkan dan dilaksanakan karena peluang yang diberikan perundang-undangan yang ada. Dikatakan begitu karena apabila kekayaan desa yang adalah peluang dari faktor lingkungan yang dimiliki oleh desa tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh desa dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, maka tertutuplah kesempatan atau peluang desa untuk memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan (Syafitri & Listyawati, 2022).

Dikatakan demikian, karena dalam pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengatur bahwa (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa; dan (2) Pengutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Negeri Latuhalat sebagai salah satu Negeri Adat yang berada dan termasuk dalam wilayah Kota Ambon, merupakan salah satu negeri yang bila dilihat secara kasat mata, memiliki potensi (peluang-peluang lingkungan) yang cukup banyak. Potensi ini apabila dimanfaatkan dengan baik, akan dapat menjadi sumber pendapatan asli desa (Negeri) yang dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negeri Latuhalat. Faktor-faktor lingkungan yang dimaksud baik itu, posisi dan letak geografisnya, maupun keadaan dan kekayaan alam serta keadaan dan kemampuan penduduknya. Hal ini terlihat dimana terdapat sejumlah faktor lingkungan yang merupakan peluang seperti:

1. Posisi strategis Negeri Latuhalat yang berada ditepian pantai ujung tanjung Nusaniwe dan memiliki keindahan panorama alam yang luar biasa.
2. Disepanjang tepian pantai petuanan Negeri terhampar pasir putih yang menawan, dengan deru ombak yang mempesona.
3. Banyak ditanami pohon kelapa sepanjang pantai dengan produksi yang cukup memadai seakan setiap saat siap dimanfaatkan masyarakat.
4. Banyak sekali kunjungan masyarakat untuk berwisata sambil menikmati kekayaan alam yang ada.
5. Banyak sekali kegiatan usaha kuliner yang diusahakan masyarakat sepanjang daerah pantai wisata.
6. Jumlah penduduk Negeri Latuhalat yang cukup banyak yang terdiri dari 11.215 KK dengan bermacam mata pencaharian yang diguluti masyarakat yakni : sebagian besar Nelayan sisanya Petani dan PNS.
7. Jarak Negeri Latuhalat dengan Ibu Kota Provinsi relatif pendek yang kurang lebih 17 Km dan mudah dijangkau masyarakat karena terdapat jalan yang baik dan cukup banyak kendaraan yang melewati negeri ini.

Walaupun faktor lingkungan pemerintah Negeri Latuhalat dengan peluang- peluang atau potensi-potensi yang ada tersebut, ternyata berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan, cenderung belum cukup dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Negeri Latuhalat. Hal ini tampak dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Pembangunan Negeri seolah-olah berjalan di tempat.
2. Pemerintah Negeri Latuhalat, belum dapat membiayai aparatur Pemerintahan Negeri yaitu Perangkat Negeri dan Seniri Negeri yang tidak dibiayai Pemerintah.
3. Pembiayaan pembangunan negeri masih terlalu besar ketergantungannya dengan sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya.

4. Sumber pendapatan asli negeri masih relatif sedikit yaitu dari biaya pembuatan surat keterangan dan bagian dari dari transaksi penjualan hak atas tanah yang ditetapkan 10%, dengan jumlah pendapatan yang masih kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul :
”Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dengan Pemanfaatan Peluang Faktor Ekologis Administrasi Pemerintahan Desa Di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang didesain dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh, holistik, mendalam, dan memberikan uraian yang bersifat deskriptif dari suatu kolektifitas dan representatifitas yang tetap terjamin dilakukan.

Penelitian dengan metode kualitatif ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mempertajam karakteristik dan gejala yang diteliti dalam mengungkap masalah menjadi jelas, memahami makna dibalik data yang tampak, memahami perasaan dan interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan secara mendalam berdasarkan prosedur penelitian kualitatif dalam mengungkap pemanfaatan peluang factor ekologis pemerintahan Desa sebagai sumber pendapatan asli Desa di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Aparatur Pemerintahan Negeri yang terdiri dari Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dan tokoh masyarakat di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang merupakan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan peluang ekologis aspek alamiah sebagai sumber pendapatan asli di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan asli negeri yang diperoleh dari pungutan dari sumber-sumber kekayaan negeri termasuk dari potensi kekayaan alam yang potensial yang ditetapkan sebagai sumber pendapatan asli negeri.

Berdasarkan itu, maka dituntut dari aparaturnya pemerintahan negeri untuk menetapkan sumber-sumber pendapatan negeri tersebut dalam suatu Peraturan Negeri tentang sumber pungutan negeri dimaksud. (Rokhayati et al., 2022) Hal ini perlu dilaksanakan karena kalau tidak maka Negeri akan kekurangan sumber pendapatan yang berdampak pada kemampuan keuangan

negeri. Disamping itu apabila tidak dimanfaatkan, dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, maka negeri akan kehilangan sumber tersebut.

Dikatakan demikian karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa sumber pendapatan yang ada di desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak dapat dilakukan pungutan tambahan oleh Pemerintah Negeri, sebaliknya sumber pendapatan yang sudah dipungut desa tidak dapat diambil oleh pemerintah daerah. (Sahi et al., 2022)

Demikian pula, dalam Psl 72 UU No.6 Thn 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa; Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. (Magrisa et al., 2022)

Mengenai bagaimana pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli Negeri dari kekayaan alam Negeri di Negeri Latuhalat adalah sebagai berikut:

1. Peluang Potensi Alam

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan ditemui bahwa walaupun potensi factor ekologis beraspect alamiah berupa keadaan dan kekayaan alam di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang terdiri dari: 5 (lima) pantai wisata masing-masing: Batu Konde di Dusun Waimahu; Namalatu Beach di Dusun Kori; Kolin Beach di Dusun Kori; Santai Beach di Dusun Omputty; dan Pantai Ronawiska di Dusun Omputty, ternyata belum dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Negeri Latuhalat.

Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Negeri di Negeri Latuhalat yang menetapkannya sebagai sumber pendapatan bagi Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Negeri, dimana beliau mengatakan bahwa:

“di Negeri Latuhalat belum menetapkan sumber pendapatan asli dari sumber Lokasi Wisata atau Tempat Pemandian yang ada di Negeri Latuhalat ini. Masing-masing lokasi wisata dikelola oleh keluarga yang memiliki lahan/tanah dimana lokasi wisata itu berada. Selama ini tidak ada kontribusi dari setiap lokasi wisata tersebut bagi Negeri. Apakah itu dari karcis masuk para pengunjung ke lokasi pantai wisata maupun kegiatan penjualan makanan di dalam lokasi tersebut”.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Negeri Latuhalat, yang mengatakan:

“lokasi wisata yang ada di Negeri Latuhalat ini sejak Saya menjadi Kepala Urusan Pemerintahan yang sudah lebih dari delapan tahun ini, belum member kontribusi bagi pendapatan Negeri. Semua lokasi pantai Wisata tersebut dikelola oleh Keluarga pemilik lahan tersebut. Memang negeri juga belum membicarakan tentang kemungkinan ada pungutan atau bagian negeri dari pungutan dari karcis masuk lokasi wisata”.

Demikian pula jawaban Tokoh Masyarakat Bapak Dany L, yang mengatakan Bahwa:

“memang potensi alam di Negeri Latuhalat ini sangat menjanjikan sebagai tujuan kunjungan wisata baik local, Nusantara maupun Mancanegara. Kunjungan ke lokasi wisata yang ada cukup banyak terutama pada hari-hari libur. Sayangnya selama ini tidak ada usaha dari pemerintah Negeri untuk menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri Latuhalat. Selama ini tidak atau belum ada inisiatif dari Pemerintah Negeri untuk membuat Peraturan Negeri terkait dengan Penetapan Pungutan Negeri yang bersumber dari pemanfaatan atau kunjungan wisatawan ke Lokasi Wisata Pantai yang ada, apalagi sampai sekarang belum ada Raja Negeri Latuhalat yang definitive walaupun sudah ada hasil pemilihan Raja Negeri Latuhalat”.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama ini, dalam meningkatkan atau memperoleh pendapatan asli Negeri dengan memanfaatkan potensi factor ekologis aspek alamiah yaitu potensi sumber daya alam berupa Pantai wisata. Belum ada penetapan sumber penerimaan Negeri yang bersumber dari kunjungan wisatawan ke lokasi wisata pantai yang ada melalui Peraturan Negeri Latuhalat. Dengan kata lain belum dimanfaatkan peluang factor ekologis beraspek alamiah berupa kekayaan alam pantai wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri Latuhalat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Negeri di Negeri Latuhalat yang menetapkannya sebagai sumber pendapatan bagi Negeri.

2. Peluang Potensi Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan ditemui bahwa walaupun potensi factor ekologis beraspek alamiah berupa keadaan dan kemampuan penduduk di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berupa jumlah penduduk yang banyak dan keadaan mata pencaharian penduduk yang mendukung pendapatan penduduk, namun ternyata belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Negeri Latuhalat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Negeri Latuhalat, dimana beliau mengatakan bahwa:

“di Negeri Latuhalat belum menetapkan sumber pendapatan asli dari sumber keadaan dan kemampuan penduduk dalam artian bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana berupa iuran Kepala Keluarga (KK). Seperti yang saudara singgung tadi, bahwa dari segi pendapatan masyarakat berdasarkan mata pencahariannya memang cukup memadai. Nampaknya masyarakat menurut Kepala Keluarga mampu menyumbang atau memberi iuran pembangunan bagi desa. Namun selama ini juga belum ada pembicaraan tentang kemungkinan itu, apalagi menetapkannya dalam suatu Peraturan Negeri tentang Pungutan Negeri terkait hal ini”.

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan pembangunan Negeri Latuhalat, bahwa:

“dilihat dari potensi penduduk Negeri Latuhalat yang banyak dan pencaharian serta pendapatan mereka memang sangat bisa untuk memberikan sumbangan dalam rangka partisipasi mereka bagi pembangunan Negeri. Namun hal ini belum ditetapkan dalam suatu Peraturan Negeri sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri. Mungkin hal ini harus dimusyawarahkan dengan penduduk atau para Kepala keluarga di Negeri Latuhalat ini untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Setelah itu diatur atau dibicarakan lebih rinci melalui forum Saniri Negeri sebelum disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Negeri”.

Sementara itu, jawaban Tokoh Masyarakat Bapak Minggu, yang mengatakan Bahwa:

“memang potensi penduduk Negeri Latuhalat cukup besar. Ini tampak sekali dengan jumlah KK yang cukup banyak. Apalagi hampir semua penduduk dewasa di Negeri Latuhalat ini mempunyai mata pencaharian tetap. Dari mata pencaharian mereka itu, rata-rata KK tersebut mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut saya, jika dimintahkan atau dimusyawarahkan, KK yang ada di Negeri Latuhalat ini, dapat berpartisipasi dengan memberikan iuran pembangunan Negeri. Namun sampai saat ini, menurut saya belum ada pemikiran dari Pemerintah Negeri termasuk Saniri”

Sedangkan menurut Bapak Wellem sebagai salah satu Anggota Saniri Negeri di Negeri Latuhalat, yang menjawab bahwa:

“dilihat dari segi jumlah Kepala Keluarga di Negeri Latuhalat, memang cukup banyak. Dari segi mata pencaharian juga cukup baik. Bahkan KK yang bekerja sebagai pegawai pemerintah baik itu sebagai PNS maupun sebagai Anggota TNI/POLRI cukup banyak. Itu berarti dari segi pendapat masyarakat (KK) memang cukup memadai. Belum pernah dibicarakan tentang kemungkinan Negeri menetapkan sumber pendapatan dari iuran KK untuk pembangunan Negeri. Belum ada Peraturan Negeri terkait dengan Penerimaan Negeri dari sumber tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama ini, dalam meningkatkan atau memperoleh pendapatan asli Negeri dengan memanfaatkan potensi factor ekologis aspek alamiah yaitu potensi keadaan dan kemampuan penduduk. Belum ada penetapan sumber penerimaan Negeri yang bersumber dari partisipasi dan swadaya masyarakat berupa iuran KK yang ada melalui Peraturan Negeri Latuhalat. Dengan kata lain belum dimanfaatkan peluang factor ekologis beraspect alamiah berupa keadaan dan kemampuan penduduk sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri Latuhalat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Negeri di Negeri Latuhalat yang menetapkannya sebagai sumber pendapatan bagi Negeri.

3. Peluang Potensi Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan ditemui bahwa walaupun potensi factor ekologis beraspect kemasyarakatan berupa potensi social ekonomi di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berupa usaha ekonomi masyarakat yang cukup beragam dan potensial, namun ternyata belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Negeri Latuhalat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Negeri Latuhalat, dimana beliau mengatakan bahwa:

“di Negeri Latuhalat belum menetapkan sumber pendapatan asli dari sumber kegiatan ekonomi masyarakat yang ada dalam artian iuran semacam pajak retribusi desa terkait dengan usaha ekonomi masyarakat tersebut. Memang cukup memadai kegiatan ekonomi masyarakat di Negeri Latuhalat ini namaun banyak diantaranya juga menjadi kewenang pemerintah Kota Ambon dalam memungut pajak seperti Hotel dan Restoran, Toko dan Kios-kios. Mengenai usaha lain yang tidak dipungut oleh Pemerintah Kota Ambon memang ada namun tidak pernah dipungut oleh Pemerintah Negeri Latuhalat. Jadi selama ini tidak ada sumber pendapatan asli desa dari kegiatan usaha ekonomi masyarakat karena itu belum ada pula Peraturan Negeri yang ditetapkan terkait dengan sumber pendapatan Negeri dari kegiatan ekonomi masyarakat”.

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan pembangunan Negeri Latuhalat, bahwa:

“potensi kegiatan ekonomi masyarakat di Negeri Latuhalat memang cukup banyak namun seperti Hotel dan Restoran termasuk Rumah Makan, pertokoan telah dipungut oleh Pemerintah Kota Ambon. Kegiatan ekonomi masyarakat yang lain seperti kios, angkutan umum termasuk ojek yang tidak dipungut Pemerintah Kota, sebenarnya dapat dipungut oleh Pemerintah Negeri Latuhalat. Namun selama ini tidak atau belum ada pungutan Pemerintah Negeri Latuhalat dari sumber tersebut. Memang belum ada Peraturan Negeri yang ditetapkan terkait sumber pendapatan yang berasal dari usaha ekonomi masyarakat”.

Sementara itu, jawaban Tokoh Masyarakat Bapak Minggu dan Bapak Dany L, yang juga mengatakan Bahwa:

“ kegiatan ekonomi masyarakat yang beraneka ragan di Negeri Latuhalat cukup beragam dan sebenarnya cukup potensial. Tapi kegiatan ekonomi masyarakat tersebut tidak pernah dijadikan sumber pendapatan asli Negeri”.

Sedangkan menurut Bapak Deyk Tuhusula yang adalah salah satu Anggota Saniri Negeri di Negeri Latuhalat, yang menjawab bahwa:

“ potensi kegiatan ekonomi masyarakat di Negeri Latuhalat cukup besar. Banyak ragam kegiatan ekonomi masyarakat. Walaupun demikian, sebagiannya kewenangan pemungutan berada di Pemerintah Kota Ambon sesuai Peraturan. Tetapi juga ada kegiatan ekonomi masyarakat yang lain seperti industry batu bata, kendaraan angkutan kota dan ojek cukup potensial sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan. Namun selama ini belum ada aturan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Negeri terkait pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakat ini”.

Berdarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon selama ini, dalam meningkatkan atau memperoleh pendapatan asli Negeri dengan memanfaatkan potensi factor ekologis aspek social kemasyarakatan yaitu potensi kegiatan social ekonomi masyarakat. Belum ada penetapan sumber penerimaan Negeri yang bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakat Negeri, berupa pajak retribusi Negeri. Dengan kata lain belum dimanfaatkan peluang factor ekologis beraspek social kemasyarakatan berupa kegiatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri Latuhalat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Negeri di Negeri Latuhalat yang menetapkannya sebagai sumber pendapatan bagi Negeri.

Pembahasan

1. Peluang Potensi Alam

Penelitian menunjukkan bahwa potensi factor ekologis aspek alamiah berupa potensi kekayaan alam di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, cukup besar. Potensi alam berupa keindahan alam pantai cukup besar dengan lima lokasi dimana cukup dikenal oleh masyarakat baik Local, Nusantara maupun Mancanegara. Jumlah kunjungan wisata ke lokasi wisata alam pantai yang ada cukup besar dalam satu bulannya. Karena itu, potensi pantai wisata di Negeri Latuhalat ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli di Negeri Latuhalat. (Pora et al., 2022) Walaupun potensi pantai wisata di Negeri Latuhalat ini adalah peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan asli Negeri, tetapi tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Negeri Latuhalat sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri. Potensi yang sedemikian besar ini, adalah peluang yang baik yang seharusnya dapat dimanfaatkan Pemerintah Negeri sebagai sumber Pendapatan Asli Negeri. Jika sumber pendapatan dari peluang potensi keadaan kekayaan alam Negeri ini dimanfaatkan dengan baik, maka sangat mungkin meningkatkan pendapatan asli Negeri. Dan apabila peluang potensi ini dimanfaatkan dengan baik dengan ditetapkan dalam Peraturan Negeri, serta dilaksanakan pemungutan dengan baik, maka sangat berpotensi pula dalam memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan Negeri.

2. Peluang Potensi Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi factor ekologis beraspek alamiah berupa keadaan dan kemampuan penduduk di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sangat memadai. Potensi keadaan dan kemampuan yang sedemikian besar yang terlihat dari banyaknya Kepala Keluarga (KK) serta ditunjang dengan mata pencaharian penduduk yang beragam dan menunjukkan pendapatan penduduk yang tetap dan memadai pula. Dengan pendapatan yang tetap dan memadai tersebut memungkinkan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Negeri. (Puspantari, 2022) Artinya dengan potensi keadaan dan kemampuan penduduk yang sedemikian besar, dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan partisipasi pendudukan dalam pembangunan berupa sumbangan dana (iuran) pembangunan. Karena itu, jika potensi keadaan dan kemampuan penduduk tersebut dimanfaatkan dengan baik, akan sangat mungkin dapat meningkatkan pendapatan asli Negeri. Dan dengan peluang potensi ini dimanfaatkan dengan baik dan ditetapkan dalam Peraturan Negeri, serta dilaksanakan pemungutan dengan baik, maka sangat berpotensi pula dalam memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan Negeri.

3. Peluang Potensi Sosial Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi factor ekologis beraspek social kemasyarakatan berupa kegiatan ekonomi masyarakat di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sangat memadai. Potensi social ekonomi masyarakat cukup besar walaupun sebagian diantaranya adalah kewenangan Pemerintah Kota Ambon, namun sebagian lain menjadi kewenangan Pemerintah Negeri sehingga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Negeri. (Hijrah, 2023) Dengan memanfaatkan peluang factor ekologis kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Negeri tersebut dimanfaatkan dengan baik, akan sangat mungkin dapat meningkatkan pendapatan asli Negeri. Sehingga apabila peluang potensi ini dimanfaatkan dengan baik dengan ditetapkan dalam Peraturan Negeri, serta dilaksanakan pemungutan dengan baik, maka sangat berpotensi pula dalam memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan Negeri.

SIMPULAN

Terdapat tiga potensi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Negeri Latuhalat, yaitu potensi alam, potensi keadaan dan kemampuan penduduk, serta potensi sosial ekonomi. Potensi alam di Negeri Latuhalat, Kota Ambon cukup besar berupa Pantai Wisata yang berjumlah lima lokasi. Potensi tersebut sangat potensial dan merupakan peluang yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli Negeri. Peluang potensi pantai wisata

tersebut belum dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Latuhalat. Selain itu, potensi keadaan dan kemampuan penduduk berupa jumlah penduduk dengan Kepala Keluarga yang banyak, serta mata pencaharian yang beragam dan berpendapatan memadai. Potensi ini sangat memadai sehingga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli Negeri. Peluang keadaan dan kemampuan penduduk tersebut belum dimanfaatkan sehingga belum ditetapkan dalam sebuah Peraturan Negeri Latuhalat. Disamping itu, potensi sosial ekonomi berupa UMKM juga dapat menunjang potensi pariwisata di Negeri Latuhalat, Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, J., & Issn, P. S. (2022). *PERANAN WISATA SETIGI (SELO TIRTO GIRI) DALAM PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA Ika Devy Pramudiana , 2 Zuhdi Ahmadi Rafiatma , 3 Sri Kamariyah , 4 Nihayatus Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia Pendahuluan Pariwisata di Indon. 4668(1), 119–135.*
- Akomodasi, J., Desa, D. I., Kabupaten, S., Utara, L., Mutmainah, M., Masyhudi, L., & Habibi, P. (2022). *3 1,2,3. 2(1), 11–18.*
- Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. 1(3).*
- Dicky Dwi Wahyudi, Hanny Purnamasari, & Gun Gun Gumilar. (2022). EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 145–154.* <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2600>
- Hijrah, N. (2023). *KABUPATEN ENREKANG Analysis Of The Potential Of Bumdes In Increasing Didesa Cemba Village ' s Genuine Income Enrekang District. 3, 39–47.*
- Ismowati, M., Fadhila, E., & Firmansyah, V. Z. (2022). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisurua, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Sosial, 1(8), 853–864.*
- Kaja, P., Komang, N., Agustini, T., Ayu, D., Wirantari, P., & Yudhartha, P. D. (2021). *Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bhuwana Sari Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Denpasar Barat, Kota Denpasar. 2–5.*
- Khairinnisa, & Merina, C. I. (2022). Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. *SEIKO : Journal of Management & Business, 4(3), 104–112.* <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2399>
- Magrisa, M. D., Sulistiyowati, Y., & Suhendri, H. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Blantika: Multidisciplinary ... , X(X), 1–15.* [http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1724%0Ahttp://rinjani.unitri.ac.id/bitstream/handle/071061/1724/Maria Dionensia M..pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1724%0Ahttp://rinjani.unitri.ac.id/bitstream/handle/071061/1724/Maria%20Dionensia%20M..pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo, K. (2022). Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province. *Jurnal Ilmiah*

- Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>
- Muhammad Frengki, Muhammad Zulfian Surya Pratama, Binsar Setiawan Manurung, & Wiwin Yulianingsih. (2023). Optimalisasi Kinerja Bumdes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 23–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.157>
- Nur, M., Ismail, T., & Ismawati, B. (2023). *Economics and Digital Business Review Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. 4(2), 436–444.
- Pora, R., Ibrahim, A. H., & Tubuli, M. R. S. (2022). Jurnal Government of Archipelago ISSN 2775-2925. *Government of Archipelago*, 3(1), 1–10.
- Puspantari, K. A. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Wisata Besan Kabupaten Klungkung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(2), 43–49. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.2.5941.43-49>
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>
- Rokhayati, H., Mustafa, R. M., & Perbendaharaan, D. J. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja*. 1(4), 710–722.
- Sahi, A., Tumuhulawa, A., Nuna, M., Biongan, A., Pauweni, L., & Gorontalo, U. (2022). *Economics and Digital Business Review Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Kebijakan Bumdes Di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Abstrak*. 3(2), 397–411.
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 14–22. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/2038>
- Sandag, H. A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 94–111.
- Syafitri, D., & Listyawati, L. (2022). *Soetomo Administration Reform Review* 761. 1(5), 761–770.